

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Digital Transformation Disclosure*

2.1.1.1 *Pengertian Digital Transformation*

Warner & Wäger (2019) mendefinisikan Transformasi digital sebagai penggunaan teknologi digital baru, seperti teknologi seluler, kecerdasan buatan, *cloud*, *blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT), untuk memungkinkan peningkatan bisnis yang besar guna meningkatkan pengalaman pelanggan, merampingkan operasi, atau menciptakan model bisnis baru.

Digital transformation atau transformasi digital adalah sebuah perubahan cara penanganan sebuah pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas (Danuri, 2019).

Menurut Royyana (2018), Transformasi digital adalah perubahan organisasi yang melibatkan orang, proses, strategi, struktur, melalui penggunaan teknologi dan model bisnis untuk meningkatkan kinerja.

Menurut Haryati (2021), Transformasi digital ialah transformasi yang digunakan dalam bisnis yang hanya merujuk kepada perubahan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital.

Menurut Hinings et al., (2018) dalam Agostino & Costantini (2022) Transformasi digital adalah efek gabungan dari beberapa inovasi digital yang membawa aktor-aktor baru (dan konstelasi aktor), stuktur, praktik, nilai, dan

kepercayaan yang mengubah, mengancam, menggantikan, atau melengkapi aturan main yang sudah ada di dalam organisasi, ekosistem, industri, atau bidang tertentu.

Dari beberapa pengertian diatas mengenai *Digital Transformation* dapat disimpulkan bahwa *Digital Transformation* merupakan perubahan sistem kerja gabungan dari beberapa inovasi digital sebuah perusahaan dengan menggunakan teknologi digital baru untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan agar lebih efektif dan efisien.

2.1.1.2 Unsur Digital Transformation

Menurut Suwatno (2021) dalam Jamaludin et al. (2022) ada tiga unsur yang terlibat dalam proses transformasi digital, yakni:

1. Bisnis

Perubahan transformasi digital yang sangat cepat menuntut perusahaan untuk meninjau kembali model bisnis mereka, berfokus pada pengalaman pelanggan, memikirkan kembali merek, dan mengungkap peluang baru melalui inovasi yang cepat.

2. Organisasi

Perubahan transformasi digital menuntut perusahaan untuk menyesuaikan budaya organisasi, memperkenalkan cara kerja baru, dan membangun kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan era digital.

3. Teknologi

Perubahan transformasi digital juga menuntut penerapan teknologi baru serta keterampilan yang melibatkan ekstraksi dan pertukaran data serta analisis dan konversi data menjadi informasi. Informasi tersebut digunakan sebagai input dalam proses pengambilan keputusan dan/atau memulai kegiatan yang meningkatkan kinerja dan jangkauan perusahaan.

2.1.1.3 Indikator Digital Transformation

Transformasi digital yang dilakukan oleh organisasi dan perusahaan didefinisikan dalam beberapa indikator berikut (Farhani & Chaniago, 2021):

1. Keberadaan aktif *online*, ciri utama dari transformasi digital adalah terjadinya perubahan saluran pemasaran dari *offline* menjadi *online* atau *hybrid customer advocacy* (Raharjo, 2019).
2. Penjualan terkoordinasi, proses penjualan dari mulai menemukan prospek, memeliharanya, dan terjadi transaksi yang awalnya dilakukan secara manual berubah menjadi berbasis digital dan jauh lebih terkoordinasi dan efisien operasi bisnis (Raharjo, 2019)
3. Kolaboratif, media digital membuat kita dapat terhubung setiap saat dimana hal tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kolaborasi dalam menyelesaikan pekerjaan (Raharjo, 2019)
4. Penyederhanaan operasi, pola kerja dan kegiatan operasional bisnis yang awalnya manual akan berubah menjadi lebih sederhana dengan berbasis digital, dengan demikian akan terjadi peningkatan pelayanan (Decker, 2020).
5. Kapitalisasi dan penggunaan data, digitalisasi menciptakan database yang selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan berbagai keputusan mulai dari pemetaan pasar, penentuan produk serta layanan, dan lainnya (Decker, 2020)
6. Bertahan selama masa pandemi karena go online, transformasi digital tidak sebatas berubah menjadi online, akan tetapi bagaimana melalui transformasi digital membawa bisnis berkembang dan mempertahankan eksistensinya (Setyowati, 2020)
7. Proses pemanfaatan teknologi digital yang ada untuk berubah, seperti pemanfaatan teknologi virtualisasi, komputasi bergerak, *cloud computing*, integrasi semua sistem yang ada di organisasi menjadi sesuatu yang baru atau

bernilai baru, seperti: kemudahan bertransaksi, berbelanja, berkomunikasi dan lainnya (Chaniago, 2021).

2.1.1.4 Pengukuran *Digital Transformation Disclosure*

Pengukuran *Digital Transformation Disclosure* ini dapat dilihat dari keberlanjutan perusahaan. *Digital transformation Disclosure* diukur dengan kerangka kerja penilaian yang terdiri dari lima dimensi utama, yaitu orang, teknologi, proses, pelanggan, serta strategi dan investasi yang seluruhnya terdiri dari sembilan subdimensi. Alat ukur menggunakan Indeks Kesiapan Digital/*Digital Readiness Index* (DRI). Kerangka kerja penilaian yang terdiri dari lima dimensi utama dan sembilan subdimensi tersebut merupakan hasil temuan penelitian yang hasil rata-rata tertimbang per dimensi dan subdimensi mendukung pengembangan indeks komposit kesiapan digital organisasi.

Adapun kerangka kerja kesiapan digital menurut Agostino & Costantini (2022) dapat dilihat dalam Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2. 1

Dimensi dan Subdimensi Kerangka Kerja Kesiapan Digital

Dimensi	Subdimensi	Indikator	Scoring
Orang	Keterampilan digital	1. Memberikan pelatihan terhadap pegawai untuk mendorong perusahaan dalam transformasi digital.	0-1
		2. Terdapat pegawai yang terspesialisasi dalam transformasi digital.	0-1
Teknologi	Adopsi teknologi	3. Memiliki kebijakan terkait adopsi teknologi	0-1
	Analisis data	4. Penyimpanan dan pengumpulan data dengan cara mengarsip secara digital.	0-1

Dimensi	Subdimensi	Indikator	Scoring
	Infrastuktur teknologi	5. Keberadaan koneksi Wi-Fi di perusahaan.	0-1
Proses	Front Office	6. Penggunaan teknologi dalam berinteraksi dengan pelanggan.	0-1
	Back Office	7. Mempertimbangkan sejauh mana proses internal didigitalkan.	0-1
Pelanggan	Kesadaran pelanggan	8. Penggunaan saluran media sosial dalam memasarkan produk dan layanan yang disediakan oleh bank.	0-1
		9. Memberikan layanan digital untuk pelanggan.	0-1
Strategi dan investasi	Strategi digital	10. Memiliki strategi implementasi teknologi digital jangka panjang.	0-1
	Investasi	11. Menginvestasikan sumber daya dalam proyek transformasi digital.	0-1

Sumber: Kerangka kerja kesiapan digital (Agostino & Costantini, 2022)

Bobot nilai pada setiap dimensi dan subdimensi menghasilkan 0-1, di mana 0 berarti ketiadaan digitalisasi dan 1 merupakan nilai tertinggi dari digitalisasi penuh. Adapun formula untuk mengukur *Digital Transformation Disclosure* adalah sebagai berikut:

$$DRI = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan}}{\text{Jumlah seluruh item}}$$

Sumber: (Agostino & Costantini, 2022)

Menurut M. A. Utami & Septivani (2023) *Digital Transformation* diukur menggunakan indeks yang dikembangkan oleh *Cisco Consulting* (Bradley et al., 2014) yang terdiri dari 21 item, yaitu: *dial-up experience, email contactcenter, online brochureware, database, customer relationship management, web-based account organization, online calculators & bill pay, click to chat & call, know your customer, seamless experience, full-function smartphone apps, internal & hybrid cloud, click to video, big data & analytics, 360 customer views, digital banks,*

digital branches, rich cross-channel collaboration & advice, omnichannel analytics, market one customer-centricity, dan intercloud yang dilihat dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan perbankan.

2.1.2 Corporate Governance Disclosure

2.1.2.1 Pengertian Corporate Governance Disclosure

Corporate Governance menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Sedangkan menurut Savitri (2019) *Corporate Governance* dapat diartikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk mengelola risiko yang signifikan sehingga perusahaan dapat memenuhi tujuan bisnisnya melalui tata kelola dan sistem bekerja dengan baik dalam perusahaan, pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang.

Yang dimaksud dengan “*governance*” adalah pengendalian, sehingga tata kelola perusahaan mengacu pada tata kelola atau pengendalian suatu organisasi perusahaan. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan standar perilaku dan perilaku yang diharapkan dari direktur dan eksekutif senior lainnya (termasuk manajer keuangan) dalam mengarahkan dan mengendalikan urusan perusahaan (Goel, 2020)

Corporate governance disclosure sebagai instrument yang digunakan untuk mengungkapkan informasi-informasi tata kelola perusahaan. Pengungkapan tata

kelola adalah cara bagi perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pasar. Seperti diketahui bahwa manajemen, yang menjalankan perusahaan, harus memiliki banyak informasi dan kontrol atas kegiatan operasional perusahaan. Informasi yang asimetris antara manajemen dan pasar, menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan pasar terhadap manajemen (Firmansyah et al., 2021). Perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai sarana untuk mengungkapkan informasi tata kelola perusahaan.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu sistem pengelolaan atau pengendalian perusahaan yang dirancang untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

2.1.2.2 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Corporate Governance bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik dan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan sudah seharusnya untuk menerapkan prinsip-prinsip utama dari *corporate governance*. Adapun prinsip-prinsip mengenai *corporate governance* menurut Sutedi (2011) dalam Savitri (2019) sebagai berikut:

1. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dengan keterbukaan informasi yang

penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
4. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).
5. Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Menurut Syofyan (2021) prinsip-prinsip *Corporate Governance* adalah sebagai

berikut:

1. *Fairness* (Kewajaran)

Perusahaan dalam melakukan kegiatan, harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perlakuan setara terhadap pemegang saham, mencerminkan sifat adil, pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama, harus diperlakukan setara terhadap peseroan.

2. Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*)

Hak-hak para pemegang saham harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta kepentingan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan perusahaan (*stakeholders*).

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Di dalam *Corporate Governance*, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan. Semua itu perlu dilakukan demi terciptanya perusahaan yang dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Hal ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Menurut Surifah & Rofiqoh (2020) prinsip *Corporate Governance* prinsip *corporate governance* ditujukan untuk membantu pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan memperbaiki kerangka hukum, peraturan, kelembagaan *corporate governance*, guna mendukung efisiensi ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas keuangan. Prinsip *corporate governance*, meliputi:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses. Informasi meliputi (namun tidak terbatas pada) visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan *corporate governance* serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu penetapan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi, sesuai dengan visi, misi, sasaran dan strategi perusahaan. Semua organ organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *corporate governance*. Terdapat *check and balance system* dalam pengelolaan perusahaan.
3. Pertanggung-jawaban (*responsibility*), yaitu berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
4. Independen (*independency*), yaitu independent, obyektif, dan bebas dari segala tekanan dalam mengambil keputusan. Perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran. Pemberian kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat, serta memberikan akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

2.1.2.3 Unsur-unsur *Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2011) dalam Savitri (2019) terdapat unsur-unsur *corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan (dan selalu diperlukan dalam perusahaan) serta unsur-unsur yang ada di luar perusahaan (dan yang selalu

diperlukan di luar perusahaan) yang bisa menjamin berfungsinya *corporate governance* yaitu:

1. Unsur yang berasal dari dalam perusahaan: pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan/serikat pekerja, sistem remunerasi berdasar kinerja dan komite audit.
2. Unsur-unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan meliputi: keterbukaan dan kerahasiaan, transparansi, *accountability*, *fairness*, aturan dari *code of conduct*.
3. Unsur yang berasal dari luar perusahaan: kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memiliki kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman, lembaga yang mengesahkan legalitas.
4. Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan meliputi: aturan dari *code of conduct*, *fairness*, *accountability*, jaminan hukum.

2.1.2.4 Manfaat *Corporate Governance*

Penerapan *corporate governance* tidak hanya melindungi kepentingan para investor saja tetapi juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Berbagai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan penerapan *corporate governance* menurut Dwiridotjahjono (2011) dalam Permata Sari (2021) antara lain:

1. Dengan penerapan *corporate governance* perusahaan dapat meminimalkan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya

- perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.
2. Perusahaan dapat meminimalkan *cost of capital*, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur.
 3. Dengan *corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan.
 4. *Corporate governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut.
 5. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi.

Menurut Surifah & Rofiqoh (2020) manfaat penerapan *corporate governance* adalah meningkatkan kinerja perusahaan dan dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Manfaat menerapkan *corporate governance* yang konsisten dan efektif adalah:

1. Mengurangi biaya keagenan, yaitu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (*Cost of Capital*)
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang
4. Menciptakan dukungan para *stakeholders* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

2.1.2.5 Pengukuran *Corporate Governance Disclosure*

Corporate Governance Disclosure adalah instrument yang digunakan untuk mengungkapkan informasi-informasi mengenai perusahaan. Perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai sarana untuk mengungkapkan informasi tata kelola perusahaan. Dalam penelitian ini *corporate governance disclosure* diukur melalui *Content Analysis* yang telah dikembangkan oleh para peneliti untuk mengidentifikasi item-item apa saja yang merupakan *corporate governance*. Analisis ini digunakan dengan cara menganalisis laporan tahunan perusahaan untuk menjawab 120 item rekomendasi yang diajukan dalam Kode Tata Kelola Perusahaan Inggris pada penelitian Elmagrhi et al. (2020) yang dibagi menjadi 5 pilar utama yaitu kepemimpinan (8 item), efektivitas (37 item), akuntabilitas (36 item), praktik remunerasi (22 item) dan hubungan baik dengan pemegang saham (17 item). Kelebihan dari penggunaan indeks yang sesuai dengan Kode Gabungan Inggris adalah lebih menangkap konsep tata kelola perusahaan pada kondisi sesungguhnya karena dalam Kode Gabungan Inggris tersebut diatur prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang lebih luas, jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang bersifat parsial atau hanya menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Berikut adalah rincian dari indikator *content analysis* dari Kode Gabungan Inggris agar dapat menilai laporan tahunan perusahaan:

Tabel 2. 2

Indeks Corporate Governance Disclosure

Tema CGI	Item CGI:	Scoring
Sub Indeks Kepemimpinan:		
(i) Struktur Dewan	1. Keanggotaan Dewan	0-1
	2. Peran Ganda	0-1
	3. Frekuensi Rapat Dewan	0-1
	4. Kehadiran Individu Direktur Rapat Dewan	0-1
	5. Kehadiran Mayoritas Rapat Dewan	0-1
	6. Pernyataan tentang Independensi ketua	0-1
	7. Penunjukan Direktur Independensi Senior	0-1
	8. Peran Dewan dan Manajer	0-1
Sub-Indeks Efektivitas		
(ii) Dewan dan Direktur	9. Ketua Dewan adalah Direktur Non-Eksekutif	0-1
	10. Independensi Ketua	0-1
	11. Komposisi Dewan	0-1
	12. Klasifikasi Direktur	0-1
(iii) Evaluasi Dewan dan Direktur	13. Proses Penilaian Dewan/Eksekutif	0-1
	14. Evaluasi Kinerja Dewan	0-1
	15. Evaluasi kinerja Individu Direktur	0-1
	16. Evaluasi Kinerja Komite Dewan	0-1
	17. Evaluasi Kinerja CEO	0-1
	18. Evaluasi Kinerja Ketua	0-1
	19. Evaluasi yang difasilitasi secara eksternall	0-1
(iv) Pemilihan Kembali Anggota Dewan	20. Proses Pemilihan Kembali Dewan/Eksekutif	0-1
	21. Nama Direktur	0-1
	22. Rincian Biografi Direktur	0-1
	23. Rincian Direktur Lainnya	0-1
	24. Pengalaman Direktur	0-1
(v) Program Induksi dan Pelatihan	25. Induksi dan Pelatihan diberikan kepada semua Direktur	0-1

Tema CGI	Item CGI:	Scoring
	26. Rincian Program Pelatihan	0-1
(vi) Bebas Konsultasi Hukum	27. Bebas Akses ke Konsultasi Hukum Independen	0-1
(vii) Perdagangan dan Transaksi Orang Dalam	28. Hubungan Direktur/Pejabat dan Sekuritas	0-1
	29. Direktur/Pejabat berbagi urusan	0-1
(viii) Nominasi Panitia	30. Keberadaan	0-1
	31. Kerangka Acuan	0-1
	32. Keanggotaan	0-1
	33. Komposisi	0-1
	34. Independensi Ketua	0-1
	35. Frekuensi Pertemuan Nominasi Panitia	0-1
	36. Kehadiran Anggota Individu dalam Rapat Nominasi Panitia	0-1
	37. Kehadiran Mayoritas Pertemuan Nominasi Panitia	0-1
	38. Evaluasi Panitia sebagai Kelompok	0-1
	39. Evaluasi Ketua	0-1
	40. Evaluasi Anggota Individu	0-1
(ix) Kantor Sekertaris Perusahaan	41. Keberadaan	0-1
	42. Identitas	0-1
	43. Kerangka Acuan	0-1
	44. Kehadiran Rapat Dewan	0-1
	45. Catatan Kehadiran Rapat	0-1
Sub-Indeks Akuntabilitas		
(x) Akuntabilitas Dewan	46. Menyiapkan Laporan Tahunan dan Akun Tahunan	0-1
	47. Status Kelangsungan Hidup Perusahaan	0-1
(xi) Komite Audit	48. Keberadaan	0-1
	49. Meninjau Sistem Manajemen Risiko	0-1
	50. Kerangka Acuan	0-1
	51. Kenggotaan	0-1

Tema CGI	Item CGI:	Scoring
	52. Komposisi	0-1
	53. Independensi Ketua	0-1
	54. Frekuensi Pertemuan Komite Audit	0-1
	55. Kehadiran Anggota Individu dalam Rapat Komite Audit	0-1
	56. Kehadiran Mayoritas Pertemuan Komite Audit	0-1
	57. Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Auditor Eksternal	0-1
	58. Rapat Audit Eksternal	0-1
	59. Rapat Pribadi Audit Eksternal	0-1
	60. Biaya Audit	0-1
	61. Evaluasi Komite Audit sebagai Kelompok	0-1
	62. Evaluasi Ketua	0-1
	63. Evaluasi Anggota Individu	0-1
(xii) Manajemen Resiko	64. Resiko Aktual dan Potensial	0-1
	65. Evaluasi Resiko	0-1
	66. Kebijakan Manajemen Risiko	0-1
	67. Komite Manajemen Risiko	0-1
	68. Kerangka Acuan	0-1
	69. Keanggotaan	0-1
	70. Komposisi	0-1
	71. Frekuensi Pertemuan Komite Manajemen Risiko	0-1
	72. Kehadiran Anggota Individu dalam Rapat Komite Manajemen Risiko	0-1
	73. Kehadiran Mayoritas Pertemuan Komite Manajemen Risiko	0-1
	74. Evaluasi Komite Resiko sebagai Kelompok	0-1
	75. Evaluasi Ketua	0-1
	76. Evaluasi Anggota Individu	0-1
(xiii) Audit Internal dan Kontrol	77. Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal	0-1

Tema CGI	Item CGI:	Scoring
	78. Keberadaan Unit Audit Internal	0-1
	79. Pertemuan Tahunan dengan Komite Audit	0-1
	80. Pertemuan Pribadi dengan Komite Audit	0-1
	81. Tinjauan Resiko dan Sistem Pengendalian Internal	0-1
Sub-Indeks Remunerasi		
(xiv) Komite Remunerasi	82. Keberadaan	0-1
	83. Keanggotaan	0-1
	84. Komposisi	0-1
	85. Independensi Ketua	0-1
	86. Frekuensi Pertemuan Komite Remunerasi	0-1
	87. Kehadiran Anggota Individu dalam Rapat Komite Remunerasi	0-1
	88. Kehadiran Mayoritas Pertemuan Komite Remunerasi	0-1
	89. Evaluasi Ketua	0-1
	90. Evaluasi Anggota Individu	0-1
	91. Kerangka Acuan	0-1
	92. Remunerasi CEO	0-1
	93. Remunerasi Direktur Lain	0-1
	94. Remunerasi Tunai Semua Direktur	0-1
	95. Remunerasi NED	0-1
	96. Remunerasi Non-Tunai Semua Direktur	0-1
	97. Kebijakan Gaji Eksekutif	0-1
	98. Kepentingan Kepemilikan Direktur	0-1
	99. Komposisi Remunerasi ED	0-1
	100. Konsultan Remunerasi	0-1
	101. Remunerasi semua Direktur dengan Nama	0-1
	102. Rencana Insentif Jangka Panjang Direkto	0-1
	103. Filosofi Remunerasi Direksi	0-1

Tema CGI	Item CGI:	Scoring
Sub-Indeks Hubungan dengan Pemegang Saham		
	104. Kewajiban kepada Pemegang Saham	0-1
	105. Pemberitahuan tentang Rapat Umum Tahunan	0-1
	106. Pengungkapan Hak Pemegang Saham	0-1
	107. Nama-nama Anggota Dewan yang hadir dalam RUPS	0-1
	108. Kehadiran Ketua Dewan dalam RUPS	0-1
	109. Ketua NC hadir dalam RUPS	0-1
	110. Kehadiran Ketua RC di RUPS	0-1
	111. Kehadiran Ketua AC pada RUPS	0-1
	112. Kehadiran Ketua RMC di RUPS	0-1
	113. Aktivisme Pemegang Saham	0-1
	114. Kebijakan Pemungutan Suara Proxy	0-1
	115. Kewajiban kepada masyarakat/komunitas	0-1
	116. Masalah Lingkungan	0-1
	117. Masalah Sosial	0-1
	118. Program Pelatihan dan Pendidikan Karyawan	0-1
	119. Kesehatan dan Keselamatan	0-1
	120. Kode Etik	0-1

Sumber: (Elmagrhi et al., 2020)

Pemberian skor dilakukan dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang menerapkan salah satu rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Kode Gabungan Inggris dan memberikan nilai 0 untuk perusahaan yang belum menerapkan rekomendasi tersebut. Data terkait penerapan rekomendasi tata kelola perusahaan

oleh perusahaan didapatkan dari laporan tahunan perusahaan. Adapun formula untuk mengukur prinsip tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{ICGD} = \frac{\text{Total item } \textit{corporate governance disclosure}}{\text{Total Score Item Rekomendasi}}$$

Sumber: (Elmagrhi et al., 2020)

Menurut Firmansyah et al. (2021) mengukur *corporate governance disclosure* menggunakan indeks yang dikembangkan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.32/SEOJK.04/2015 yang secara eksplisit mengatur penerapan corporate governance bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Indeks terdiri dari lima dimensi pengukuran utama berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Pengukuran ini akan dibandingkan dengan item-item yang diungkapkan dalam laporan tata kelola perusahaan. Jika item dalam pengukuran diungkapkan, maka diberi nilai 1, dan jika tidak maka diberi nilai 0. Total skor kemudian akan dibagi dengan jumlah item sebagaimana Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.32/SEOJK.04/2015. Lima dimensi pengukuran tata kelola perusahaan meliputi:

1. Hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham.
2. Fungsi dan peran Dewan Komisaris
3. Fungsi dan peran Direksi
4. Partisipasi pemangku kepentingan
5. Keterbukaan informasi

Adapun formula yang digunakan untuk mengukur Corporate Governance Disclosure berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.32/SEOJK.04/2015 adalah sebagai berikut:

$$CGD = \frac{\text{Total score item yang diungkapkan}}{\text{Total Item rekomendasi}}$$

Sumber: (Firmansyah et al., 2021)

Sedangkan menurut Herbert & Agwor (2021) *Corporate Governance Disclosure* diukur melalui *Content Analysis* dari data dalam laporan tahunan bank-bank dengan menggunakan beberapa indikator yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan informasi perusahaan dengan menganalisis pengungkapan notasi perusahaan yang terdiri atas: CGDBD (*Corporate Governance Disclosure on Board of Directors*), CGDWBP (*Corporate Governance Disclosure on Whistle Blowing Policy*) dan CGDRF (*Corporate Governance Disclosure on Risk Framework*). Adapun indikator pengukuran *Corporate Governance Disclosure* menurut Herbert & Agwor (2021) adalah sebagai berikut:

S/N	GROUP	CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURE ITEM
<i>CGBDB Corporate Governance Disclosure on Board of Directors</i>		
1	CGDBD	<i>Whether the roles of chairperson and CEO/MD are split</i>
2	CGDBD	<i>Whether the chairperson of the board is a non-executive director.</i>
3	CGDBD	<i>Whether the board is composed of a majority of non-executive directors (NEDs)</i>
4	CGDBD	<i>How often does the board meet? Whether the board meets at least four times in a year</i>
5	CGDBD	<i>Whether the records of individual directors' meetings are disclosed</i>
6	CGDBD	<i>Whether directors are classified into executive directors, NED, and independent directors.</i>
7	CGDBD	<i>Whether the board's evaluation report is disclosed</i>

S/N	GROUP	CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURE ITEM
8	CGDBD	<i>Whether director's biography and experience are disclosed.</i>
9	CGDBD	<i>Whether share ownership by all insiders is disclosed</i>
10	CGDBD	<i>Whether a nomination committee has been established.</i>
11	CGDBD	<i>Whether the nomination committee consist of a majority is a NED</i>
12	CGDBD	<i>Whether the chairperson of the nomination committee is a NED</i>
13	CGDBD	<i>Whether the members of the nomination committee are disclosed</i>
14	CGDBD	<i>Whether the nomination committee's members' meetings attendance record is disclosed</i>
15	CGDBD	<i>Whether a remuneration committee has been established</i>
16	CGDBD	<i>Whether the remuneration committee is constituted entirely by independent NEDs.</i>
17	CGDBD	<i>Whether the chairperson of the remuneration committee is an independent NED</i>
18	CGDBD	<i>Whether the members of the remuneration committee are disclosed</i>
19	CGDBD	<i>Whether the remuneration committee's member's meetings attendance record is disclosed</i>
20	CGDBD	<i>Whether a firm's board is formed by at least one male and one female (board diversity based on gender) person.</i>
21	CGDBD	<i>Whether bank succession plan for their top executive is disclosed</i>
22	CGDBD	<i>Whether the board of directors has at least two independent NED.</i>
CGDRF: Corporate Governance Disclosure on Risk Framework		
1	CGDRF	<i>Whether an audit committee has been established</i>
2	CGDRF	<i>Whether the audit committee is constituted by NEDs and shareholders representatively</i>
3	CGDRF	<i>Whether the chairperson of the audit committee is a shareholder representative</i>
4	CGDRF	<i>Whether the members of the audit committee are disclosed</i>
5	CGDRF	<i>Whether the members of the audit committee are split equally between shareholders and directors</i>
6	CGDRF	<i>Whether the audit committee's members' meetings attendance record is disclosed</i>
7	CGDRF	<i>Whether a risk management committee has been established</i>
8	CGDRF	<i>Whether the risk committee's members' meetings attendance record is disclosed</i>
9	CGDRF	<i>Whether a narrative on both actual and potential future systematic and non-systematic risks is disclosed</i>

S/N	GROUP	CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURE ITEM
10	CGDRF	<i>Whether a narrative of the risk framework is disclosed</i>
11	CGDRF	<i>Whether the existence of a Chief Risk Officer is disclosed</i>
12	CGDRF	<i>Whether a narrative of the procedures and processes for identification, measurement, monitoring, control, and reporting of the current and future risks is disclosed</i>
13	CGDRF	<i>Whether a narrative of the actual measures taken by a firm to address occupational health and safety of its employees is disclosed</i>
14	CGDRF	<i>Whether the bank's handling of consumer complaints is disclosed</i>
15	CGDRF	<i>Whether a credit committee has been established</i>
16	CGDRF	<i>Whether the chairperson of the credit committee is a NED</i>
17	CGDRF	<i>Whether the members of the credit committee are disclosed</i>
18	CGDRF	<i>Whether the credit committee's members' meetings attendance record is disclosed</i>
19	CGDRF	<i>Whether corporate governance compliance status is disclosed</i>
20	CGDRF	<i>Whether related party transactions are disclosed</i>
21	CGDRF	<i>Whether regulatory/supervisory contraventions are disclosed</i>
22	CGDRF	<i>Whether regulatory penalties and sanctions are disclosed</i>
23	CGDRF	<i>Whether frauds and forgeries are disclosed</i>
CGDWBP: Corporate Governance Disclosure on Whistleblowing Policy		
1	CGDWBP	<i>Whether the bank whistle-blowing policy is disclosed</i>
2	CGDWBP	<i>Whether a narrative on the existence of a code of ethics is disclosed</i>
3	CGDWBP	<i>Whether a narrative of bank whistleblowing procedure is disclosed</i>
4	CGDWBP	<i>Whether a narrative that the bank whistle-blowing policy is appropriately communicated to all employees is disclosed</i>
5	CGDWBP	<i>Whether a narrative of declaration of management and board commitment to the whistleblowing policy is disclosed</i>
6	CGDWBP	<i>Whether the objectives of the whistleblowing policy are disclosed</i>
7	CGDWBP	<i>Whether an analysis of whistleblowing cases is disclosed</i>
8	CGDWBP	<i>Whether a hotline and/or dedicated email for complaint is disclosed</i>

Sumber: Herbert & Agwor (2021)

Dalam penelitian ini *Corporate Governance Disclosure* diukur melalui *Content Analysis* yang diajukan dalam Kode Tata Kelola Perusahaan Inggris pada

penelitian Elmagrhi et al. (2020) yang dibagi menjadi 5 pilar utama yaitu kepemimpinan (8 item), efektivitas (37 item), akuntabilitas (36 item), praktik remunerasi (22 item) dan hubungan baik dengan pemegang saham (17 item). Kelebihan dari penggunaan indeks yang sesuai dengan Kode Gabungan Inggris adalah lebih menangkap konsep tata kelola perusahaan pada kondisi sesungguhnya karena dalam Kode Gabungan Inggris tersebut diatur prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang lebih luas, jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang bersifat parsial atau hanya menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

2.1.3 Sustainability Banking

Menurut Yip & Bocken (2018) *Sustainability Banking* didefinisikan sebagai penyediaan produk dan layanan keuangan, yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga lingkungan sambil menghasilkan keuntungan.

Menurut Rebai dalam Igbudu et al. (2018) *Sustainability Banking* dianggap sebagai proses menciptakan nilai-nilai etika bagi para pemangku kepentingan, yang juga berperan dalam mengkonsolidasikan dan mentransformasi industri perbankan.

Menurut Polonskaya dan Babenko (2012) dalam Ruhayat & Murwaningsari (2019) Perbankan berkelanjutan memberikan peluang untuk menciptakan produk dan layanan inovatif yang memiliki keunggulan sosial dan lingkungan, energi terbarukan, proses dan teknologi produksi yang lebih bersih, efisiensi energi, keuangan mikro, konservasi keanekaragaman hayati, layanan keuangan bagi kelompok marjinal, perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan agen-agen perbankan. Melalui produk-produk tersebut, bank akan mendapatkan akses ke

pasar baru dan nasabah baru, menciptakan itikad baik, membawa modal baru, dan memberikan dukungan kepada para pemangku kepentingan.

Berdasarkan ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *Sustainability Banking* adalah menciptakan produk dan layanan keuangan dengan cara mentransformasi industri perbankan untuk menjaga lingkungan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan menghasilkan keuntungan.

2.1.3.1 Pengukuran *Sustainability Banking Disclosure*

Dalam penelitian ini *Sustainability Banking Disclosure* diukur melalui *Content Analysis* menggunakan penilaian keuangan berkelanjutan yang diperkenalkan oleh *World Wide Fund Sustainable Banking* (WWF- SUSBA) berdasarkan standar internasional seperti GRI, IIRC, TCFD, dan SASB. Pedoman ini ditujukan untuk mengatasi isu-isu lingkungan dan sosial yang spesifik di Asia Tenggara. Penilaian SUSBA dapat digunakan oleh pemegang saham, calon investor, regulator, dan perwakilan masyarakat sipil untuk melacak kemajuan bank dan kinerja integrasi lingkungan, sosial dan tata kelola untuk menganalisis evolusi hasil dari tahun ke tahun. Selain itu, beberapa bank juga memilih menggunakan SUSBA untuk meningkatkan strategi, peta jalan, dan rencana aksi ESG mereka.

Pengukuran *Sustainability Banking* ini menggunakan 76 item pengungkapan. Analisis ini digunakan dengan cara menganalisis laporan keberlanjutan perusahaan untuk menjawab 76 item penilaian yang diajukan dalam penilaian keuangan berkelanjutan WWF SUSBA.

Berikut adalah rincian dari indikator *content analysis* dari penilaian keuangan berkelanjutan WWF SUSBA agar dapat menilai laporan keberlanjutan perusahaan:

Tabel 2. 3

Item Pengungkapan dari Penilaian Perbankan Berkelanjutan

Tema	Item:	Scoring
Sub Indeks Tujuan:		
(i) Strategi keberlanjutan dan keterlibatan pemangku kepentingan	1. Apakah ada referensi yang jelas mengenai keberlanjutan dalam strategi dan visi jangka panjang bank?	0-1
	2. Apakah bank secara jelas mengakui bahwa jejak E&S-nya mencakup dampak tidak langsung yang timbul dari kegiatan bisnisnya (misalnya pembiayaan, penjaminan, pemberian nasihat) dan portofolio?	0-1
	3. Apakah pernyataan pimpinan mengacu pada integrasi faktor E&S dalam strategi bisnis bank?	0-1
	4. Apakah ada referensi yang jelas tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam strategi atau visi bank?	0-1
	5. Apakah bank secara eksplisit mengakui risiko sosial dan ekonomi yang terkait dengan perubahan iklim?	0-1
	6. Apakah bank secara eksplisit mengakui risiko sosial dan ekonomi yang terkait dengan degradasi lingkungan?	0-1
	7. Apakah bank telah mengidentifikasi pembiayaan/pinjaman yang bertanggung jawab dan/atau isu-isu E&S utama lainnya yang dianggap penting?	0-1
	8. Apakah bank mengungkapkan jenis-jenis pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam isu-isu lingkungan dan sosial?	0-1
	9. Apakah bank terlibat dengan masyarakat sipil dan/atau lembaga swadaya masyarakat untuk memahami Dampak lingkungan & sosial dari kegiatan bisnisnya?	0-1
	10. Apakah bank mengungkapkan frekuensi dan cara komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam isu-isu lingkungan dan sosial?	0-1

Tema	Item:	Scoring
(ii) Partisipasi dalam inisiatif keuangan berkelanjutan	11. Apakah bank terlibat dengan regulator dan pembuat kebijakan tentang integrasi E&S dan/atau keuangan yang berkelanjutan?	0-1
	12. Apakah bank berpartisipasi dalam inisiatif keuangan berkelanjutan berbasis komitmen yang relevan seperti RSPO, PRB, EP, SBTi, atau SBEFP?	0-1
Sub Indeks Kebijakan:		
(iii) Pernyataan publik tentang isu-isu ESG tertentu	13. Apakah bank memiliki prinsip-prinsip pengecualian yang mencakup kegiatan-kegiatan yang tidak akan didukung oleh bank, dengan mempertimbangkan pertimbangan lingkungan dan sosial?	0-1
	14. Apakah bank mewajibkan klien yang sangat terpapar risiko terkait iklim untuk mengembangkan rencana mitigasi dan pada akhirnya menyelaraskan kegiatan mereka dengan tujuan Perjanjian Paris?	0-1
	15. Apakah bank melarang pembiayaan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru?	0-1
	16. Apakah bank mengakui adanya risiko kehilangan keanekaragaman hayati dan/atau deforestasi dalam kegiatan kliennya?	0-1
	17. Apakah bank mewajibkan klien di sektor-sektor yang sangat terpapar deforestasi (mis. komoditas lunak, infrastruktur, industri ekstraktif) untuk mengadopsi komitmen "tanpa deforestasi" baik dalam operasi maupun rantai pasoknya, sesuai dengan pendekatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau Stok Karbon Tinggi (SKT)?	0-1
	18. Apakah bank mewajibkan klien di sektor-sektor yang sangat terpapar pada konversi ekosistem alami (mis. komoditas lunak, infrastruktur, industri ekstraktif) untuk mengadopsi komitmen "tanpa konversi" baik dalam operasi maupun rantai pasoknya, sesuai dengan prinsip-prinsip Prakarsa Kerangka Kerja Akuntabilitas?	0-1

Tema	Item:	Scoring
	19. Apakah bank mengenali dampak negatif terhadap lingkungan laut sebagai risiko dalam aktivitas klien?	0-1
	20. Apakah bank mewajibkan klien yang bergerak di industri yang berhubungan dengan kelautan untuk mendapatkan sertifikasi dari atau mendukung standar keberlanjutan multi-pemangku kepentingan yang relevan (mis. ASC, MSC, SuRe) untuk memastikan penggunaan samudera, laut, dan sumber daya kelautan yang berkelanjutan?	0-1
	21. Apakah bank memiliki komitmen untuk tidak menyediakan produk dan layanan keuangan kepada proyek atau perusahaan yang berlokasi di, atau memiliki dampak negatif terhadap, keanekaragaman hayati utama dan kawasan lindung, termasuk Situs Warisan Dunia UNESCO, Kawasan Lindung Kategori I-IV IUCN, dan Lahan Basah yang Memiliki Nilai Penting Internasional yang ditetapkan dalam Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah?	0-1
	22. Apakah bank mengenali risiko air (banjir, kelangkaan, dan polusi) sebagai risiko dalam kegiatan nasabahnya?	0-1
	23. Apakah bank mewajibkan klien di sektor dan wilayah berisiko tinggi untuk melakukan penilaian risiko air dan berkomitmen untuk melakukan penatagunaan air?	0-1
	24. Apakah bank mengenali risiko hak asasi manusia, termasuk yang terkait dengan masyarakat lokal, dalam kegiatan kliennya?	0-1
	25. Apakah bank mewajibkan klien untuk berkomitmen menghormati hak asasi manusia, sejalan dengan Panduan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia?	0-1
	26. Apakah bank mengakui pelanggaran hak-hak tenaga kerja sebagai risiko di semua sektor?	0-1

Tema	Item:	Scoring
	27. Apakah bank mewajibkan klien untuk mematuhi standar ketenagakerjaan internasional yang setara dengan Konvensi Dasar ILO?	0-1
	28. Apakah bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi paparan terhadap aktivitas terlarang yang melibatkan satwa liar dan kejahatan lingkungan?	0-1
	29. Apakah persyaratan E&S bank berlaku untuk produk dan layanan keuangan di luar pinjaman (mis. pasar modal, konsultasi)?	0-1
(iv) Pernyataan publik tentang sektor-sektor tertentu	30. Apakah bank memiliki kebijakan sektoral untuk industri yang sensitif terhadap lingkungan atau sosial, misalnya komoditas pertanian, energi, minyak dan gas, pertambangan, makanan laut, infrastruktur?	0-1
	31. Apakah bank mengungkapkan kebijakannya untuk sektor-sektor yang sensitif terhadap lingkungan atau sosial?	0-1
	32. Apakah kebijakan E&S khusus sektor bank mencakup persyaratan atau rekomendasi minimum berdasarkan berdasarkan standar yang diakui secara internasional untuk praktik-praktik E&S terbaik (misalnya Standar Kinerja IFC, RSPO, FSC, dll.)?	0-1
	33. Apakah bank secara berkala meninjau kebijakan lingkungan dan sosialnya atau menyatakan bahwa tanggal terakhir peninjauan adalah dalam 2 tahun terakhir?	0-1
Sub Indeks Proses:		
(v) Menilai risiko ESG dalam persetujuan klien & transaksi	34. Apakah bank menggunakan kerangka kerja standar untuk uji tuntas lingkungan, sosial, dan sosial (misal: alat, daftar periksa, kuesioner, penyedia data eksternal) ketika meninjau klien atau transaksi yang tunduk pada kebijakannya?	0-1
	35. Apakah bank menilai kapasitas, komitmen, dan rekam jejak klien sebagai bagian dari proses uji tuntas lingkungan, sosial, dan sosial?	0-1

Tema	Item:	Scoring
	36. Sebagai bagian dari proses persetujuan, apakah bank mengklasifikasikan klien dan transaksinya berdasarkan penilaian risiko lingkungan dan sosial?	0-1
	37. Apakah ada mekanisme eskalasi untuk kasus-kasus yang lebih kompleks atau kontroversial?	0-1
	38. Apakah hasil penilaian risiko lingkungan & sosial mempengaruhi keputusan transaksi dan penerimaan klien?	0-1
(vi) Pemantauan dan keterlibatan klien	39. Apakah bank mengupayakan pencantuman klausul (misal: covenant, representasi & jaminan) yang terkait dengan isu-isu lingkungan & sosial dalam dokumentasi pinjaman untuk fasilitas kredit bilateral dan sindikasi?	0-1
	40. Apakah bank mewajibkan klien yang tidak sepenuhnya mematuhi kebijakan lingkungan dan sosialnya untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi yang terikat waktu?	0-1
	41. Apakah bank memantau kepatuhan kliennya terhadap rencana aksi lingkungan dan sosial yang telah disepakati?	0-1
	42. Apakah bank melakukan tinjauan berkala atau menyatakan seberapa sering bank meninjau profil kliennya di bidang lingkungan dan sosial?	0-1
	43. Apakah bank mengungkapkan proses untuk mengatasi ketidakpatuhan nasabah yang sudah ada terhadap kebijakan bank atau terhadap rencana aksi lingkungan, sosial, dan sosial yang telah disepakati sebelumnya?	0-1
	44. Apakah bank secara berkala meninjau prosedur internal lingkungan & sosialnya atau menyatakan bahwa tanggal terakhir peninjauan adalah dalam 2 tahun terakhir?	0-1
Sub Indeks Orang:		
(vii) Tanggung jawab untuk ESG	45. Apakah manajemen senior bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi ESG bank?	0-1

Tema	Item:	Scoring
	46. Apakah tanggung jawab manajemen senior mencakup pengelolaan risiko dan peluang perubahan iklim yang relevan dengan aktivitas bank?	0-1
	47. Apakah bank menjelaskan peran dan tanggung jawab berbagai departemen, komite, atau tim yang terlibat dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan E&S?	0-1
	48. Apakah bank telah menerapkan sistem pengendalian internal dengan tiga lini pertahanan untuk mengelola isu-isu lingkungan dan sosial?	0-1
	49. Apakah kerangka acuan komite Nominasi mencakup kriteria terkait keberlanjutan untuk penunjukan anggota Dewan yang baru?	0-1
	50. Apakah kerangka acuan komite Remunerasi mencakup kriteria terkait keberlanjutan untuk penilaian kinerja dan tingkat remunerasi bagi manajemen senior?	0-1
	51. Apakah kerangka acuan komite Audit mensyaratkan hal-hal terkait keberlanjutan untuk dimasukkan ke dalam pengendalian internal dan proses audit?	0-1
	52. Apakah bank menerapkan audit berkala untuk menilai pelaksanaan kebijakan dan prosedur E&S?	0-1
(viii) Pelatihan staf E&S dan evaluasi kinerja	53. Apakah bank memiliki tim ESG yang berdedikasi untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur E&S?	0-1
	54. Apakah bank melatih stafnya tentang kebijakan E&S dan proses pelaksanaannya?	0-1
	55. Apakah bank menyediakan pelatihan khusus untuk manajemen senior, yang mencakup isu-isu keberlanjutan?	0-1
	56. Apakah kriteria terkait keberlanjutan merupakan bagian dari proses penilaian staf dan/atau diintegrasikan ke dalam KPI mereka?	0-1
	57. Apakah kriteria terkait keberlanjutan merupakan bagian dari proses penilaian manajemen senior dan/atau diintegrasikan ke dalam KPI mereka?	0-1

Tema	Item:	Scoring
Sub Indeks Produk:		0-1
(ix) Integrasi ESG dalam produk dan layanan	58. Apakah bank secara proaktif mengidentifikasi nasabah di sektor-sektor yang sensitif terhadap lingkungan hidup atau sosial untuk mendukung mereka dalam mengurangi dampak negatif atau meningkatkan dampak positif?	0-1
	59. Apakah bank menawarkan produk dan layanan keuangan tertentu (misalnya obligasi hijau, pinjaman terkait keberlanjutan, pembiayaan dampak) yang mendukung mitigasi isu-isu lingkungan hidup dan sosial, seperti perubahan iklim, kelangkaan air dan polusi, penggundulan hutan?	0-1
	60. Apakah bank telah mengalokasikan kumpulan modal tertentu atau meningkatkan porsi pembiayaannya untuk mendukung kegiatan yang berdampak positif terhadap lingkungan dan sosial?	0-1
	61. Apakah bank mengadakan kegiatan penjangkauan nasabah untuk meningkatkan kesadaran dan berbagi mengenai praktik-praktik E&S yang baik (misalnya melalui lokakarya, seminar)?	0-1
	62. Apakah bank telah menerbitkan kerangka kerja untuk produk dan layanan keuangan berkelanjutan, misalnya kerangka kerja obligasi hijau, yang selaras dengan standar internasional yang kredibel?	0-1
Sub Indeks Portofolio:		
(x) Penilaian dan mitigasi risiko lingkungan dan sosial di tingkat portofolio	63. Apakah bank secara berkala meninjau eksposur portofolionya terhadap risiko lingkungan dan sosial (misal: deforestasi, kelangkaan air, atau pelanggaran hak asasi manusia)?	0-1
	64. Apakah bank secara berkala meninjau eksposur portofolionya terhadap risiko fisik dan/atau transisi terkait iklim, dengan menggunakan analisis skenario, dan mengungkapkan hasil dan metodologi yang digunakan?	0-1

Tema	Item:	Scoring
	65. Apakah bank memiliki strategi untuk mengelola dan memitigasi risiko terkait iklim di seluruh portofolionya?	0-1
(xi) Pengungkapan eksposur dan target risiko ESG	66. Apakah bank mengungkapkan eksposur kreditnya berdasarkan sektor industri?	0-1
	67. Apakah bank mengungkapkan komposisi portofolio pinjamannya di sektor pembangkit listrik (misal: batu bara, gas, energi terbarukan) atau energi (misal: minyak & gas konvensional vs. non-konvensional, batu bara)?	0-1
	68. Apakah bank mengungkapkan emisi GRK atau intensitas karbon dari sektor-sektor utama yang intensif karbon dalam portofolionya (misal: pertanian, pertambangan & logam, energi, dll.)?	0-1
	69. Apakah bank mengungkapkan statistik tentang pelaksanaan kebijakan lingkungan, sosial, dan keselamatan (misalnya jumlah transaksi yang dinilai, dieskalasi, disetujui, ditolak, disetujui dengan syarat)?	0-1
	70. Apakah bank mengungkapkan persentase klien komoditas lunaknya yang memiliki rencana terikat waktu untuk mencapai sertifikasi penuh atas operasi mereka terhadap standar keberlanjutan multi-pemangku kepentingan yang kredibel?	0-1
	71. Apakah bank mengungkapkan persentase klien atau total eksposur kredit yang tercakup dalam kebijakan lingkungan, sosial, dan keselamatan di sektor-sektor sensitif?	0-1
	72. Apakah bank memiliki target untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial atau meningkatkan dampak positif yang terkait dengan kegiatan bisnisnya, di luar dampak langsung dari kegiatan operasionalnya, dan mengungkapkan kemajuan dalam mencapai target tersebut?	0-1

Tema	Item:	Scoring
	73. Apakah bank telah menetapkan target berbasis ilmu pengetahuan untuk menyelaraskan portofolionya dengan tujuan Perjanjian Paris, dan mengungkapkan kemajuan dalam mencapai target tersebut?	0-1
	74. Apakah bank telah berkomitmen untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol-nol dalam portofolio pinjamannya pada tahun 2050, dengan pencapaian sementara yang telah ditentukan, dan mengungkapkan kemajuan dalam mencapai target-target ini?	0-1
	75. Apakah bank melakukan asuransi eksternal atas pengungkapan terkait LST?	0-1
	76. Apakah bank mengungkapkan dampak positif dan negatif yang terkait dengan kegiatan bisnisnya, di luar dampak langsung dari kegiatan operasionalnya sendiri?	0-1

Sumber: WWF-SUSBA *Assesment* 2022

Skor 1 adalah diberikan ketika item daftar periksa sepenuhnya diungkapkan secara lengkap dan skor 0 untuk tidak ada pengungkapan. Skor total kemudian dihitung sebagai persentase item yang diungkapkan dari total. Adapun formula untuk mengukur laporan keberlanjutan perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{SUSBA} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan}}{\text{Jumlah seluruh item pengungkapan pada pedoman}}$$

Sumber: WWF-SUSBA *Assesment* 2022

Menurut Saputra et al. (2023) untuk mengukur Sustainability Banking, responden diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan yang dirancang terkait isu *sustainability banking* yang diambil dari *sustainability* PWC 2012 dan 2016 sebagai lembaga yang turut serta dalam memberikan jasa asesmen kepada seluruh bank di dunia terkait keberlanjutan. Pengukuran menggunakan tiga dimensi utama, dan 12

indikator yang terdiri dari: (1) Jaminan Keberlanjutan Perbankan, (2) Memenuhi Komitmen Publik, (3) Transparansi, (4) Risiko Sosial dan Etika Tidak Langsung, (5) Tanggung Jawab Perusahaan & Kualitas Data, (6) Pengelolaan Nasabah yang Bertanggung Jawab, (7) Perilaku Beretika, (8) Penyusunan dan Korupsi, (9) Kesejahteraan Pegawai, (10) Pengadaan Sumber Daya, (11) Outsourcing dan Offshoring, (12) Perubahan Iklim, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dampak Lingkungan Tidak Langsung serta Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Komunikasi.

Menurut Kumar & Prakash (2019) *Sustainability Banking* diukur dengan menggunakan *Content Analysis* untuk mengukur jumlah informasi yang diungkapkan berdasarkan indikator SBPF yang terdiri dari 40 indikator. Satu atau lebih kata kunci digunakan untuk mendefinisikan setiap indikator, penekanan diberikan pada eksplorasi ada atau tidaknya masing-masing indikator SBPF.

Berikut adalah rincian dari indikator *content analysis* dari indikator SBPF agar dapat mengukur jumlah informasi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan:

Group	Item	Scoring
<i>1. Sustainable product and services</i>	<i>1. Sustainable financing</i>	20
	<i>2. Climate fund</i>	
	<i>3. Environmental loan</i>	
	<i>4. Micro-finance</i>	
	<i>5. Sustainable advocacy services</i>	
	<i>6. Green mortgage</i>	
	<i>7. Socially responsible investment</i>	
	<i>8. Financial inclusion product</i>	
	<i>9. Venture capital for environmental saving product</i>	

Group	Item	Scoring
	<i>10. Green bond</i>	
2. Environmental management dimension indicators	<i>11. Certified environmental management system (ISO 14001)</i>	20
	<i>12. Sector specific exclusion</i>	
	<i>13. Environmental risk management in lending policy</i>	
	<i>14. Quantitative target about environment care initiatives</i>	
	<i>15. Adoption of environmentally friendly technologies</i>	
3. Social development dimension indicators	<i>16. Community involvement programme</i>	20
	<i>17. Charity and sponsoring</i>	
	<i>18. Financial literacy and financial counselling</i>	
	<i>19. Training and skill development programme</i>	
	<i>20. Community consultations</i>	
	<i>21. Targets for community investment</i>	
	<i>22. ISO 26000 certification</i>	
	<i>23. Health care and sanitation programme</i>	
	<i>24. Access points for financial services in low populated or remote areas of the country</i>	
	<i>25. Improve access to financial services for disadvantaged people</i>	
4. Internal socio-ethical conduct	<i>26. Policy and procedure concerning anti-corruption</i>	20
	<i>27. Policy and procedure concerning human rights</i>	
	<i>28. Policy on business ethics/values</i>	
	<i>29. Policy on labour practices</i>	
	<i>30. Gender equity and diversity</i>	
5. Sustainability code of reporting, conduct, ESG indexing	<i>31. Sustainability report disclosure</i>	20
	<i>32. Business responsibility report disclosure</i>	
	<i>33. Environment policy</i>	
	<i>34. GRI membership</i>	

Group	Item	Scoring
	<i>35. Signatory to Equator Principles</i>	
	<i>36. Adherence to UN Global Compact principles</i>	
	<i>37. Signatory to UNEP FI</i>	
	<i>38. Adherence to NVGs disclosure (country specific guidelines)</i>	
	<i>39. BSE GREENEX indexing</i>	
	<i>40. Member of Dow Jones Sustainability Index</i>	

Sumber: Kumar & Prakash (2019)

Grup 1 mewakili kegiatan pembiayaan dan pinjaman bank yang memiliki kepedulian sosial dan lingkungan. Indikator grup 2 mencerminkan komitmen bank terhadap perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui inisiatif yang diambil oleh bank untuk mengadopsi sistem manajemen lingkungan. Indikator grup 3 mencerminkan perilaku bank yang bertanggung jawab secara sosial dan bagaimana bank menciptakan pembangunan sosial di masyarakat. Grup 4 mencerminkan komitmen bank untuk mempertahankan standar sosial-etika yang tinggi di bank melalui kebijakan anti-korupsi, hak asasi manusia, etika bisnis, dan sebagainya. Grup terakhir mencerminkan sejauh mana bank berkomitmen terhadap kode etik keberlanjutan global dan terlibat dengan semua pemangku kepentingan dalam mengungkapkan kinerja non-keuangan bank. Untuk mengevaluasi skor kinerja perbankan berkelanjutan bank, poin dialokasikan untuk setiap indikator di kelima kelompok. Untuk setiap kelompok, maksimum 20 poin dapat diberikan; oleh karena itu, bank yang mengadopsi praktik perbankan berkelanjutan secara menyeluruh pada seluruh 40 indikator kerangka kerja yang diusulkan dapat memperoleh maksimum 100 poin. Selanjutnya, bobot tertentu diberikan kepada setiap kelompok tergantung pada relevansi pengaruh pembangunan berkelanjutan

yang dimiliki kelompok tersebut dalam mempromosikan inisiatif pembangunan berkelanjutan. Bobot untuk masing-masing kategori didasarkan pada curah pendapat dan wawancara tidak terstruktur dengan para pelaku bisnis.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat *Sustainability Banking*

Menurut Limarwati et al. (2024) terdapat berbagai manfaat dari penerbitan laporan keberlanjutan baik secara internal maupun secara eksternal, antara lain:

1. Secara internal, perusahaan dapat mengevaluasi dan mengidentifikasi tentang potensi-potensi peningkatan operasi dan pengurangan biaya sehingga dapat mencapai praktik operasional yang lebih berkelanjutan.
2. Perusahaan dapat meningkatkan kemampuan dan pemahamannya untuk mengidentifikasi serta mengelola risiko. Hal tersebut memungkinkan perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko-risiko tersebut. Selain itu, pelaporan keberlanjutan juga bermanfaat dalam hal penentuan strategi dan kebijakan manajemen jangka panjang.
3. Secara eksternal, pelaporan keberlanjutan dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Sedangkan menurut Hapsari (2023) manfaat laporan keberlanjutan bagi perusahaan adalah:

1. Memperkuat legitimasi perusahaan bagi masyarakat ataupun pemangku kepentingan.
2. Suatu bentuk penyampaian informasi kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan yang lebih komprehensif.

3. Dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja perusahaan yang mana nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mendukung keberlanjutan perusahaan.
4. Dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa manajemen perusahaan dapat berkomitmen dalam keberlanjutan perusahaan secara langsung dan dapat menarik investor untuk berinvestasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anjarwati et al. (2024)	Keberlanjutan Keuangan: Studi tentang Pengaruh Digitalisasi terhadap Pelaporan Keuangan Berkelanjutan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan berkelanjutan. Transformasi ini membawa efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam penyajian informasi keberlanjutan, namun juga membawa tantangan etika dan keamanan informasi.
2.	Siswanti et al. (2024)	The impact of digital transformation for sustainable business: the meditating role of corporate governance and financial performance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, adalah transformasi digital berpengaruh signifikan terhadap bisnis berkelanjutan. Kedua, transformasi digital berpengaruh signifikan terhadap tata kelola perusahaan, dan ketiga, transformasi digital berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Keempat, tata kelola perusahaan memiliki pengaruh

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			yang tidak signifikan terhadap bisnis berkelanjutan. Kelima, kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap bisnis berkelanjutan. Keenam, penelitian ini menemukan bahwa tata kelola perusahaan tidak berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antara transformasi digital dan bisnis berkelanjutan. Temuan ketujuh, kinerja keuangan bank perkreditan rakyat syariah di Indonesia memiliki potensi untuk bertindak sebagai mediator dalam hubungan antara transformasi digital dan hasil bisnis berkelanjutan.
3.	Parapat et al. (2024)	Transformasi Digital dalam Sistem Informasi Perbankan Syariah: Masa Depan Keuangan yang Berkelanjutan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem informasi perbankan syariah memiliki dampak positif yang signifikan dalam memajukan perbankan syariah menuju masa depan keuangan yang lebih berkelanjutan.
4.	Utami dan Septivani (2023)	The Role of Digital Banking in Leading Sustainable Economic Development	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan digital berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko. Sementara itu, untuk variabel laporan keberlanjutan, terbukti bahwa digital banking berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan bank, baik yang menggunakan standar umum (OJK) maupun standar GRI.
5.	(Subagyo dan Murwaningsari, 2023)	Pengaruh Visibilitas Media dan Digital Bank terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa visibilitas media dan digital bank tidak mempengaruhi bank dalam pengungkapan laporan keberlanjutan, visibilitas media dan digital bank mempengaruhi

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		dengan Tata Kelola sebagai Variabel Moderasi	bank dalam pengungkapan laporan keberlanjutan ketika dimoderasi oleh tata kelola, Tata kelola berpengaruh positif bagi perbankan dalam meningkatkan pengungkapan dan distribusi informasi laporan keberlanjutan agar dapat memberikan manfaat untuk seluruh stakeholder, Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, artinya semakin besar bank kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan semakin baik.
6.	Saputra et al. (2023)	The Role of Enterprise Risk Management and Digital Transformation on Sustainable Banking in Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko perusahaan dan transformasi digital perbankan secara signifikan dan positif mempengaruhi keberlanjutan perbankan di Indonesia.
7.	Putri et al. (2023)	Pengaruh Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di be periode 2015-2019)	Dalam penelitian ini menemukan bahwa tata kelola ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, dan individuals perusahaan signifikan berpengaruh terhadap laporan berkelanjutan, dan bahwa tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan keduanya berdampak pada pengungkapan laporan keberlanjutan.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Al Fatihah dan Widiatmoko (2022)	Pengaruh Corporate Governance Efficiency terhadap Pengungkapan Sustainability Report dan dampaknya terhadap kinerja keuangan	Hasil penelitian membuktikan bahwa corporate governance efficiency berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Pengungkapan sustainability report berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
9.	Sekar Pramesti dan Hardiningsih (2022)	Apakah Good Corporate Governance mempengaruhi Pengungkapan Sustainability Report?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sustainability report.
10.	Kusumawardani (2022)	Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Sustainability Report serta Dampaknya terhadap Return Saham (Studi Empiris pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan dan pengungkapan laporan keberlanjutan dapat memediasi pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap return saham. Kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit tidak berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan. Kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, dan sustainability report tidak berpengaruh terhadap return saham.
11.	Wijayana dan Kurniawati (2018)	Pengaruh Corporate Governance, Return on Assets dan Umur Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate governance dan return on asset memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sustainability report, sedangkan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Sustainability Report	luas pengungkapan sustainability report.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh *Digital Transformation Disclosure* terhadap *Sustainability*

Banking Disclosure

Di era digital saat ini, tidak ada pekerjaan atau aktivitas yang tidak bisa lepas dari perangkat digital, mulai dari kehidupan rumah tangga hingga aktivitas perkantoran dan pemerintahan. Lembaga riset *International Data Corporation* Indonesia (IDC) memprediksi bahwa 33% perusahaan global akan gagal jika tidak mengadopsi teknologi *cloud* dan melakukan transformasi digital. Oleh karena itu, perusahaan harus bertransformasi ke arah digital dengan meningkatkan perangkat teknologi agar dapat bertahan. Perbankan digital memungkinkan bank untuk mengembangkan layanan nasabah, memangkas biaya pengiriman, perjalanan, dan transaksi tatap muka dengan nasabah. Dengan demikian, transformasi perbankan digital dapat meningkatkan kinerja bank dan mempengaruhi keberlangsungan hidup perbankan di Indonesia (Saputra et al., 2023).

Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah ini, peran digitalisasi dalam konteks keberlanjutan keuangan menjadi semakin signifikan. Digitalisasi telah memberikan akses yang lebih cepat dan luas terhadap data keuangan, memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan berkelanjutan secara lebih efisien. Hal ini tidak hanya membantu perusahaan untuk memahami dan mengelola dampaknya terhadap keberlanjutan, tetapi juga menciptakan dasar yang lebih kuat untuk pengambilan

keputusan strategis yang dapat memberikan nilai jangka panjang (Anjarwati et al., 2024).

Penerapan teknologi digital memungkinkan organisasi untuk secara aktif berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dan secara efektif menangani masalah sosial, termasuk namun tidak terbatas pada keragaman, inklusi, dan praktik-praktik etika. Selain itu, perusahaan yang menerapkan transformasi digital dapat menggunakannya sebagai alat untuk mempercepat pekerjaan manusia dan meningkatkan laju perubahan digital secara eksponensial. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui berbagai efisiensi dan manfaat, sehingga memungkinkan operasi bisnis yang berkelanjutan (Siswanti et al., 2024).

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. (2023) Anjarwati et al. (2024), dan Siswanti et al. (2024) *digital transformation* berpengaruh terhadap *sustainability report* ini menunjukkan bahwa penerapan pengungkapan transformasi digital yang dilakukan oleh perusahaan dapat membantu perusahaan dalam melaporkan laporan keberlanjutan secara lebih efisien dan secara efektif menangani masalah sosial sehingga dapat meningkatkan pengungkapan keberlanjutan perusahaan.

2.3.2 Pengaruh *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Sustainability*

Banking Disclosure

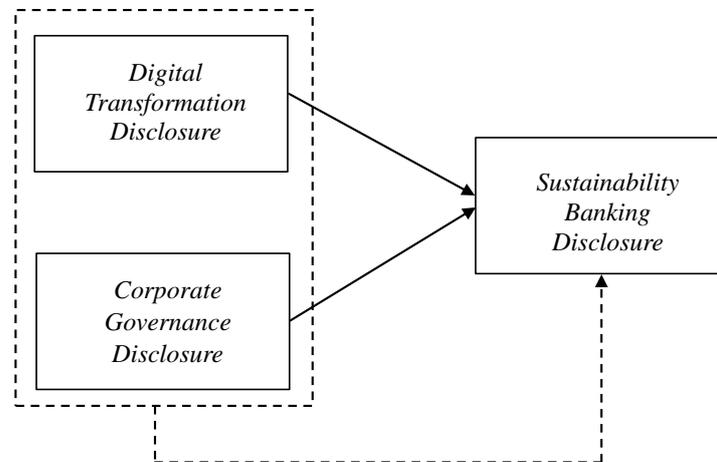
Corporate governance memiliki peranan penting dalam mengelola perusahaan agar perusahaan tersebut dapat mencapai target atau tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu pemegang saham, komisaris, direktur dan karyawan yang ada di perusahaan akan dihubungkan melalui *corporate governance*. Kesalahan-

kesalahan kinerja yang terjadi pada perusahaan akan segera dapat diperbaiki jika perusahaan tersebut menerapkan *corporate governance* dengan baik. Selanjutnya tindakan ini akan mengarah dalam meningkatkan *sustainability report* (Sekar Pramesti dan Hardiningsih, 2022).

Penerapan *corporate governance* membantu dalam pengungkapan informasi sosial dan lingkungan khususnya dalam *sustainability report* untuk menilai keselarasan keputusan perusahaan terhadap nilai-nilai sosial dan lingkungan sekitar. Pengaruh dari adanya *corporate governance* akan membantu menciptakan pengungkapan informasi yang luas dan terintegrasi guna menjadi nilai tambah tersendiri untuk para investor maupun *stakeholder* (Wijayana dan Kurniawati, 2018).

Hasil penelitian Sekar Pramesti & Hardiningsih (2022) dan Wijayana & Kurniawati (2018) *corporate governance* berpengaruh secara langsung terhadap *sustainability report*. Hal ini menandakan bahwa pengungkapan tata kelola yang dilakukan perusahaan berdampak positif terhadap *sustainability report*.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas serta untuk menggambarkan Pengaruh *Digital Transformation Disclosure* dan *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Sustainability Banking Disclosure*, maka dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil olah data (2024)

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric. Hipotesis perlu melalui pengujian untuk diuji dan dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang telah diperoleh dari sampel penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh positif *Digital Transformation Disclosure* terhadap *Sustainability Banking Disclosure*

H₂: Terdapat pengaruh positif *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Sustainability Banking Disclosure*

H₃: Terdapat pengaruh positif *Digital Transformation Disclosure* dan *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Sustainability Banking Disclosure*